Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

<http://jhii.fisip.unila.ac.id/ojs/index.php/jhii>

KERJASAMA IOM, UNHCR, PEROMPAK DAN PEMPROV SULSEL DALAM PEMENUHAN HAK DASAR PENGUNGSI ASING DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

Rheina Qur'ani,¹ M. Syaprin Zahidi²

¹Universitas Muhammadiyah Malang

²Universitas Muhammadiyah Malang

rheinaqurani@gmail.com, syaprin123@umm.ac.id

Abstrak

Pengungsi asing yang datang dari berbagai negara ke Indonesia biasanya menempati wilayah – wilayah yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini jumlah pengungsi asing atau pencari suaka yang datang ke Indonesia cukup banyak. Pemerintah Indonesia melakukan upaya kerjasama dengan berbagai organisasi terkait seperti IOM (International Organization for Migration) dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dalam penanganan maupun pemenuhan hak – hak dasar para pengungsi asing. Dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan IOM dan UNHCR dalam penanganan dan pemenuhan hak dasar pengungsi asing dalam hal ini studi pada Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian dinaungi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan terlebih dahulu memaparkan situasi dan kondisi para pengungsi asing yang berada di Sulawesi Selatan, peran perwakilan IOM dan UNHCR di Sulawesi Selatan membantu pemerintah daerah terkait dalam penanganan permasalahan pengungsi asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, laporan hasil pertemuan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan IOM dan UNHCR, serta media massa dan beberapa penelitian sebelumnya.

Kata Kunci : Pengungsi asing, IOM, UNHCR, Sulawesi Selatan

Abstract

Foreign refugees who come from various countries to Indonesia usually occupy areas that have been determined by the Indonesian government. In this case, the number of refugees or asylum seekers who come to Indonesia is quite large. The Indonesian government is making efforts to cooperate with various related organizations such as IOM (International Organization for Migration) and UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) in handling and fulfilling the basic rights of foreign refugees. This study aims to explain how the collaboration between the Indonesian government and IOM and UNHCR in handling and fulfilling the basic rights of refugees in this case is a study in South Sulawesi Province which is then sheltered by the South Sulawesi Provincial government. By first explaining the situation and condition of the refugees in South Sulawesi, the role of IOM and UNHCR representatives in South Sulawesi is to assist the relevant local government in handling the problems of foreign refugees. This study uses qualitative research methods with data collection techniques, reports on the results of meetings between the South Sulawesi provincial government and IOM and UNHCR, as well as the mass media and several previous studies.

Keywords: Foreign refugees, IOM, UNHCR, South Sulawesi

PENDAHULUAN

Di dunia saat ini, hukum internasional memainkan peran besar dalam bagaimana negara-negara berinteraksi.¹ Negara yang berbeda di seluruh dunia memiliki berbagai kerangka kebijakan imigrasi. Arah kebijakan luar negeri suatu negara berdampak pada sistem politiknya. Seperti Kanada, banyak negara menjadi lebih menyambut masuknya imigran dan pengungsi asing dengan cepat. Namun, beberapa negara mengambil tindakan sebaliknya.² Masalah paling penting yang saat ini dihadapi masyarakat luas adalah masalah pengungsi asing dan migrasi domestik.

Indonesia tidak sendirian dalam melakukan apa yang dilakukannya. Mereka harus mempraktikkan kebijakan luar negeri yang manusiawi yang menyambut orang-orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.³ Sejak 2009, Indonesia telah mengalami serangkaian masuknya pengungsi asing dari Myanmar, Afghanistan, dan Sri Lanka. Sebelumnya, pengungsi asing Timor Leste dan Vietnam transit menggunakan Indonesia (1975–1996). (1999-2008). Indonesia saat ini mengikuti dua peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur tentang penanganan pengungsi asing dari luar negeri dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI 0352.GR.02.07 tanggal 19 April 2016. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)⁴ dan The International Organization for Migration (IOM) dalam rangka implementasi kedua instrumen hukum tersebut. Dalam menangani insiden pengungsi asing dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia, Indonesia telah memenuhi tanggung jawabnya.⁵

Di Indonesia saat ini terdapat 13.343 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga) pencari suaka dan pengungsi asing dari negara lain. IOM masih memberikan bantuan kepada total 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) pengungsi asing. Berfokuskan informasi pada Sulawesi Selatan, saat ini ada 1.624 pengungsi asing yang tinggal di kota Makassar, 1245 laki-laki dan 379 perempuan tersebar di 20-*community house*. Selain itu, juga dilakukan proses pemulangan sukarela berbantuan yang dimungkinkan oleh IOM serta proses deportasi ke negara asal bagi

¹ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 92.

² Moretti Sebastien, "UNHCR and the Migration Regime Complex in Asia-Pacific between Responsibility Shifting and Responsibility Sharing," *New Issues in Refugee Research*, Research Paper No. 283, (2016), 47.

³ Kate Jastram and Marilyn Achiron, *Perlindungan Pengungsi asing*, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi asing Internasional Bagi Anggota Parlemen Nomor 2-2001, Translated by Enny Soprapto and Rama Slamet, (Jakarta: Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi asing bekerjasama dengan Uni Antar-Parlemen, 2001), 46.

⁴ UNHCR, *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), 53.

⁵ Fitria, "Perlindungan Hukum bagi Pengungsi asing di Negara Ketiga: Praktik Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2015), 105-125.

pengungsi asing dari luar negeri yang kasusnya telah ditolak oleh UNHCR.⁶ Berkaitan dengan hak dasar pengungsi asing, apa bentuk kerjasama antar IOM, UNHCR, dan Pemerintah Sulawesi Selatan perlu dikaji lebih lanjut. Membahas mengenai letak geografis, provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia dan terletak di ujung Pulau Sulawesi. Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Provinsi lain yang terletak di Pulau Sulawesi yakni bagian utara dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, di sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah barat dengan Selat Makassar serta sebelah selatan dengan Laut Flores.⁷

Pengungsi Asing di Sulawesi Selatan

Daerah yang menjadi jalur utama perdagangan internasional ratusan tahun lalu adalah Makassar. Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah, dan Asia semuanya terhubung olehnya. Makassar, Sulawesi Selatan, salah satu kota terbesar di Indonesia Timur, telah muncul sebagai pusat utama bagi para imigran dari berbagai negara. Makassar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang saat ini menerima mayoritas pengungsi asing, bersama dengan banyak kota lainnya. Kantor IOM Makassar didirikan kembali pada bulan Juli 2007 dengan fokus pada penanganan kasus-kasus imigrasi tidak teratur. Hampir semua pengungsi asing dan pencari suaka di Makassar ditampung di perumahan komunitas yang dikelola bersama dengan Imigrasi, IOM, dan penyedia perumahan komunitas swasta. Pilihan perumahan alternatif bagi imigran ke fasilitas penahanan adalah rumah komunitas atau tempat penampungan pengungsi asing. Rumah komunitas bisa menjadi tempat tidur dan sarapan, hostel, losmen, atau hotel murah. Tempat penampungan ini biasanya terletak tepat di tengah lingkungan perumahan. Mayoritas pengungsi asing dan pencari suaka di Kota Makassar telah tinggal di sini selama bertahun-tahun menunggu persetujuan UNHCR untuk diangkut ke tujuan utama mereka.⁸

Pengungsi asing dan pencari suaka bergerak ratusan bahkan ribuan mil dari negara asal mereka. Mereka menggunakan berbagai metode dan berbagai moda transportasi, termasuk darat, laut, dan udara. Pengungsi asing dan pencari suaka dari Timur Tengah dan Asia biasanya harus transit melalui negara-negara tertentu. Karena para pengungsi asing sering menggunakan Indonesia sebagai negara transit

⁶ Pusat Imigrasi Indonesia, Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi asing dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia, diakses 31 Oktober 2022.

<https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-asing-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/>

⁷ Andi Sudirman Sulaiman, Berita Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulselprov.go.id/>, diakses 31 Oktober 2022.

⁸ Slamet Sampurno Soewondo & Kadarudin, "Problem Analysis of Working Refugees in Makassar City," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 16, no.1, pp.79-96.

dalam perjalanan mereka ke Australia Beberapa sumber imigran Iran di Makassar telah mengakui bahwa jalur yang mereka tempuh untuk mencapai Indonesia dimulai di Bandara Internasional Iran. Mereka terbang ke sana dari Singapura ke Malaysia. Mereka melanjutkan perjalanan melalui udara atau air dari Malaysia ke Indonesia. Yang sering dijadikan tujuan atau singgah antara lain Medan dan Batam. Akibatnya, pihak imigrasi di Medan dan Batam menahan banyak pendatang. Di sisi lain, sejumlah migran Malaysia dengan cepat mulai melakukan perjalanan ke Jakarta, Kupang, Denpasar, dan kota-kota lain di Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada di lokasi prima untuk dijadikan sebagai negara transit atau tempat tinggal jangka pendek bagi para pengungsi asing dan pencari suaka yang berpindah antar negara sebelum tiba di negara ketiga, termasuk Australia. Salah satu hal yang menarik para pengungsi asing dan pencari suaka ke Indonesia selain letaknya yang strategis adalah telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Ribuan pengungsi asing dan pencari suaka di Indonesia tidak semuanya dapat ditampung di tiga belas fasilitas penahanan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Tak terkecuali berlaku bagi para pengungsi asing dan pencari suaka dari Iran. Mereka tetap di berbagai tempat di Indonesia karena kurangnya fasilitas, termasuk Kota Makassar.⁹

Hal ini sangat jelas terlihat dari butir 4 Surat Pernyataan yang merupakan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0352.GR.02.07 tanggal 19 April 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Mengaku sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi asing, bahwa Pengungsi asing tidak diperkenankan untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan memperoleh upah. Oleh karena itu, adalah melanggar hukum bagi para pengungsi asing di Makassar untuk bekerja sebagai tukang cukur di barbershop dan sebagai buruh bangunan. Pelanggaran terhadap hak-hak seseorang di negara asalnya, ancaman terhadap keselamatan keluarganya, atau tidak diakuinya kewarganegaraan seseorang oleh negara asalnya, semuanya dapat mengakibatkan migrasi dari satu negara (negara asal) ke negara lain.

Peran IOM dan UNHCR di Sulawesi Selatan

IOM bekerja sama dengan sejumlah organisasi pemerintah daerah untuk menjalankan misinya, antara lain Polda Sulawesi Selatan, UNHCR, dan Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (United Nations High Commissioner for Refugees). Secara khusus, kebijakan ini mencakup pemberian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi asing dan pencari suaka sebagai tanggapan atas permintaan pemerintah—dalam hal ini imigrasi—yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam rangka penanganan pengungsi asing dan pencari suaka di Kota

⁹ Rafsanjani, "Imigran di Kota Makassar," *Jurnal Universitas Negeri Makassar* (2019), 1-16.

Makassar, IOM dan Wali Kota Makassar menandatangani perjanjian kerjasama pada 21 September 2015.¹⁰

Peneliti Terdahulu

Penulis ini melakukan analisa terhadap beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan hasil Kerjasama atau kolaborasi antara Pemerintah Sulawesi Selatan, IOM, dan UNHCR. Hasil kerjasama membahas mengenai pemenuhan hak dasar pengungsi asing. Meskipun penelitian tersebut memiliki thema yang sama, namun fokus penelitiannya bervariasi. Kemudian penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya akan membedakan antara penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama adalah jurnal dengan judul *Observations on the Protection of Refugees in Indonesia* yang ditulis oleh Fithriatus Shalihah & Muhammad Nur. Sepintas tulisan ini membahas mengenai lokasi Kota Pekanbaru dan Kota Makassar yang digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi asing. Pengungsi asing biasanya hanya melewati Kota Pekanbaru dan Kota Makassar; tujuan utama mereka adalah Australia. Namun karena pembatasan keras dari pemerintah Australia, para pengungsi asing ditahan lama di Indonesia. Penelitian ini kemudian mengeksplorasi bagaimana hak-hak pengungsi asing yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi internasional tentang status pengungsi asing selama ini dipengaruhi oleh perlindungan pengungsi asing di kota Pekanbaru dan Makassar. Penulis menggunakan prosedur empiris atau sosio-legal, seperti observasi lapangan, wawancara, dan tinjauan pustaka, untuk melakukan penelitian observasional, survei, dan penelitian empiris atau sosio-legal.¹¹

Penelitian kedua adalah jurnal dengan judul *Kebijakan Out-Reach dalam Penanganan Migran di Kota Makassar* yang ditulis oleh Umiyati Haris, Suryadi Lambali, Sukri, Achmad Zulfikar. Dengan ringkas tulisan ini membahas mengenai 3 dari 5 program kebijakan Out-Reach telah berhasil dilaksanakan, namun masalah implementasi kebijakan dalam menangani pengungsi asing di Kota Makassar belum berjalan dengan baik. Keberhasilan eksekusi kebijakan dipengaruhi oleh unsur kepentingan aktor pemerintah kota. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji proses dimana Pemerintah Kota Makassar mengimplementasikan kebijakan Out-Reach dan variabel-variabel yang mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dipraktikkan dalam membantu pengungsi asing di Kota Makassar. Data dikumpulkan dari pegawai instansi pemerintah kota, pengungsi asing di Kota Makassar, dan masyarakat lokal dengan menggunakan pendekatan wawancara

¹⁰ Wandu Abbas, "Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi asing," *Journal of Political Sciences*, No. 2 (2018), 1-6.

¹¹ Fithriatus Shalihah & Muhammad Nur, "Observations on the Protection of Refugees in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* (2021): 361-384.

langsung. Desain penelitian studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif. Teori neo-kelembagaan digunakan, termasuk konsep aktor dan kepentingan, kebijakan, dan implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa Walikota Makassar bertindak sebagai pelaksana kebijakan, dan hanya beberapa organisasi pemerintah yang terlibat, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Camat ke Lurah. Dalam hubungan antar negara, baik itu organisasi lokal maupun internasional, perjanjian antar organisasi memberikan dampak yang besar.¹²

Proses koordinasi implementasi kebijakan Out-Reach juga menunjukkan bahwa lembaga swadaya masyarakat bekerjasama dengan Dinas Sosial dan masyarakat setempat untuk menjalankan program-programnya dalam membantu pengungsi asing di Kota Makassar. Baik variabel yang memungkinkan maupun yang menghambat berdampak pada bagaimana kebijakan Out-Reach diimplementasikan. Pengembangan persona walikota Makassar sebagai role model implementasi kebijakan penanganan pengungsi asing di tingkat daerah, serta pelibatan aktor non-pemerintah menjadi elemen pendukung. Jalur koordinasi yang tidak terstruktur dan sosialisasi yang tidak lengkap merupakan variabel yang menghambat pertumbuhan. Selain lembaga internal yang dibentuk walikota Makassar, ditetapkan pula keterlibatan aktor non-pemerintah dalam implementasi kebijakan Out-Reach, dan hanya tiga dari lima proyek yang berhasil dilaksanakan. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, diharapkan terjalin koordinasi dan komunikasi yang sistematis antara tingkat walikota dan lurah.¹³

Penelitian ketiga adalah jurnal dengan judul Kondisi, Permasalahan, dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi asing Internasional di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang ditulis oleh Bima Yosua A Tarigan & M. Alvi Syahrin. Meskipun tidak terjadi penandatanganan Protokol 1967 dan Konvensi Pengungsi asing 1951, Indonesia menjunjung tinggi prinsip non-refoulement dan menjunjung tinggi hak-hak mereka yang mencari perlindungan di luar negeri. Dengan mencegah pencari suaka masuk ke tanah air, semakin banyak orang yang dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban masyarakat Indonesia berakhir di sana. Dari perspektif hukum domestik dan hukum internasional, esai ini berusaha untuk memastikan keadaan, masalah, dan menawarkan jawaban bagi pencari suaka dan pengungsi asing di wilayah Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, digunakan dalam teks ini sebagai bagian dari metodologi penelitian normatif. Penerapan undang-undang yang mengatur tentang perlakuan terhadap pengungsi asing dan pencari suaka, meningkatkan hubungan dengan negara-negara tuan rumah utama, mendidik aparatur negara tentang hal ini, dan

¹² M. Syaprin Zahidi 2017, "Kepentingan Negara-Negara Anggota OKI Ditinjau Dari Derajat Legalisasi Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam", *Jurnal Opinio Juris*, vol. 21, pp. 82-103.

¹³ Umiyati Haris, Suryadi Lambali, Sukri, Achmad Zulfikar, "Kebijakan Out-Reach dalam Penanganan Migran di Kota Makassar," *Jurnal PIR* (2019): 185-200

memanfaatkan konsep Global Compact on Refugees adalah beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum domestik dan internasional mempengaruhi bagaimana pencari suaka dan pengungsi asing dilindungi.¹⁴

Berdasarkan penjelasan oleh beberapa penelitian sebelumnya, penulis dapat dengan yakin mengatakan bahwa tulisan yang disusun merupakan pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian pertama memfokuskan diri kepada hak-hak yang diperlukan oleh pengungsi asing di Indonesia terutama di Makassar. Penelitian kedua memfokuskan diri kepada efektivitas kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah lalu terdapat 3 dari 5 program yang dicanangkan. Kemudian penelitian ketiga memfokuskan diri kepada kondisi, permasalahan, dan solusi pencari suaka dan pengungsi asing internasional di wilayah Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional.

Metode Penelitian

Penerapan persyaratan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi asing di kamp-kamp pengungsi asing di Indonesia akan dijelaskan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis memberikan sejumlah data mengenai perawatan dan pengolahan pengungsi asing di Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, serta di Kota Pekanbaru, ibukota provinsi Provinsi Riau di Pulau Sumatera. Untuk melakukan penelitian observasional, survei, dan pendekatan empiris atau sosio-legal, seperti observasi lapangan, wawancara, dan tinjauan pustaka, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis.

Peneliti menggunakan metode pencarian pada website yang kredible dan penelitian kepustakaan sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan arsip (library study) dan internet dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi, seperti buku, jurnal, arsip, makalah, berita, dan sebagainya. Ada dua macam data dalam metode pengumpulan data ini: data utama dan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diturunkan dari data primer, sedangkan data primer adalah informasi yang diturunkan langsung dari suatu sumber dan biasanya terdapat pada surat kabar negara, organisasi, berita acara, arsip, dan lain-lain. pihak pertama, seperti media, percetakan, dan kutipan orang kedua.¹⁵

¹⁴ Bima Yosua A Tarigan & M. Alvi Syahrin, "Kondisi, Permasalahan, dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi asing Internasional di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional," *Journal of Law and Border Protection* (2021).

¹⁵ Franklin Roosevelt, *What is a Primary Source ? What is a DBQ (Document-based Question)? How Are Primary Sources Helpful in Learning ?*, Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum.

Teknik analisis data yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Penelitian dengan pengolahan dan hasil yang tidak menggunakan data numerik sehingga pengguna menyebutnya kualitatif (perhitungan, pengukuran).¹⁶ Dengan mengumpulkan informasi spesifik tentang hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh pengungsi asing dilanjutkan dengan informasi mengenai syarat atau kewajiban yang dibutuhkan oleh pengungsi asing untuk mendapatkan hak-hak dasar tersebut.

Kerjasama Pemenuhan Hak Kebutuhan Dasar Hak Asasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, IOM, dan UNHCR.

Kondisi dan kondisi pengungsi asing di Sulawesi Selatan tentu mencerminkan sejumlah persoalan yang mungkin juga terjadi di komunitas pengungsi asing lain seperti Aceh, Medan, dan DKI Jakarta. Analisis penulis mengidentifikasi tiga masalah utama perihal hak dasar dengan pembatasan kerja, atau pembatasan terlibat dalam kegiatan untuk menerima kompensasi hasil kerjasama antara IOM, UNHCR, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Resettlement Problem (Masalah Pemukiman)

Solusi permanen bagi pengungsi asing adalah situasi yang mengakhiri perpindahan mereka dengan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sehingga mereka dapat hidup secara normal, salah satunya adalah pemukiman kembali. Proses negosiasi dan diplomasi UNHCR yang berlarut-larut terkait pemukiman kembali atau penempatan pengungsi asing ke negara tuan rumah sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka karena mereka tidak lagi memiliki perlindungan nasional dari pemerintah negara asal mereka. Misalnya, sejak orang-orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2012, mereka telah mendekam di Makassar selama sembilan tahun tanpa mengetahui dengan pasti kapan mereka akan diangkut ke negara suaka utama.

Negara dengan potensi terbesar untuk pemukiman kembali pengungsi asing di Indonesia, termasuk di Makassar, adalah Kanada, menurut analisis kebijakan nasional dan internasional dari tiga negara utama yang menawarkan suaka: Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Misalnya, Kanada memiliki rencana untuk memukimkan kembali 36.000 pengungsi asing di negara tersebut pada tahun 2021.⁴² Namun, berdasarkan kinerja UNHCR selama tiga tahun sebelumnya, tampaknya hal ini akan sulit untuk dicapai. Banyaknya pengungsi asing di Indonesia yang berhasil direlokasi di negara-negara besar atau yang

¹⁶ Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5 No.3, 2009, hal. 2.

berhasil dipulangkan secara sukarela ke negara asalnya tidak pernah dilaporkan oleh UNHCR secara terbuka dan jujur. Apapun tindakan yang dilakukan oleh orang dari belahan bumi manapun, semua alasannya tetap sama, yakni masalah ekonomi.¹⁷

Berbagai negara dan organisasi internasional telah menyepakati berbagai peraturan dan kebijakan untuk menangani arus perpindahan orang sebagai pengungsi asing. Hal ini penting karena pengungsi asing dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan keamanan suatu negara. Hal ini berdampak pada negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah penyebab, terutama kekerasan yang berkepanjangan di negara asal mereka, berkontribusi pada penciptaan pengungsi asing, komunitas internasional tetap bertanggung jawab menangani masalah ini. Seorang pengungsi asing mengajukan paspor Indonesia pada Maret 2018 di kantor imigrasi Makassar. Namun, informasi yang dinyatakan sebagai kebutuhan pembuatan paspor adalah palsu. Mereka ingin menggunakan paspor Indonesia untuk bepergian ke Australia. Dalam hal ini, pengungsi asing menyembunyikan identitasnya dan mengaku bukan pengungsi asing ketika mengajukan paspor. Ia telah menjadi penduduk Makassar selama hampir lima tahun, sehingga penampilan dan pengetahuannya tentang bahasa Indonesia sebanding dengan orang Indonesia.

Imigran Iran termasuk di antara hampir separuh imigran di Kota Makassar yang pindah ke sana dari provinsi atau kota lain di Indonesia. Beberapa di antaranya berasal dari Rudenim Manado, Rudenim Kupang, dan Rudenim Denpasar, di antara tempat-tempat lain di Indonesia. Sementara itu, sejumlah imigran lain meninggalkan negara asalnya, menghabiskan beberapa waktu di sana, kemudian melakukan perjalanan 'langsung' ke Makassar. Saat tiba di Kota Makassar, pendatang dari kota atau negara lain akan terlebih dahulu ditahan di Rumah Detensi Imigrasi di sana sebelum ditampung di rumah masyarakat (shelter). Pengungsi asing biasanya tinggal di rumah-rumah komunitas di Kota Makassar, yang dikoordinasikan oleh IOM, pengelola rumah komunitas, dan fasilitas detensi imigrasi di sana. Imigran Iran yang berdomisili di Kota Makassar dapat dianggap hanya berusaha untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, orang mengalami ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demikian pula, ketidakpastian ini juga mempengaruhi imigran dari negara lain. Banyak dari mereka kembali ke negara asal mereka secara sukarela saat prosedur sedang berlangsung. Meski memiliki visa tinggal di Indonesia,

¹⁷ M. Syaprin Zahidi 2014, "Pemikir-Pemikir Marxis Dalam Hubungan Internasional", Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR, vol. 10, no. 01, pp. 23-36.

mereka hanya melakukan sedikit aktivitas. Secara hukum, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bekerja, baik formal maupun informal.

2. *Cost of Living Problem* (Permasalahan Biaya Hidup)

Menurut informasi, IOM bertanggung jawab untuk membayar biaya hidup para pengungsi asing. Pengungsi asing dewasa menerima Rp 1.250.000 per orang per bulan, dan anak-anak menerima Rp 500.000 per orang per bulan. Tidak mengherankan bahwa beberapa pengungsi asing melanggar undang-undang yang melarang pekerjaan mengingiat nilai nominalnya.

Alasan paling umum yang diberikan oleh para migran untuk melanggar hukum adalah kesulitan ekonomi. Ini mempengaruhi semua pengungsi asing. Kebutuhan dasar hidup adalah uang. Akibatnya, jika masalah kebutuhan ekonomi tidak ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan sejumlah masalah di kamp-kamp pengungsi asing. Misalnya, jumlah uang yang dikumpulkan oleh para pengungsi asing adalah Rp 1.250.000/orang, sesuai dengan peraturan yang telah disepakati dan diterbitkan oleh IOM selaku penanggung jawab dan pengelola perumahan dan pendanaan bagi para pengungsi asing di Makassar. . IOM menawarkan bantuan tunai bulanan ini kepada para pengungsi asing. Karena mereka tidak diizinkan bekerja di negara transit, para pengungsi asing bekerja secara sembunyi-sembunyi. Namun, masih ada pengungsi asing di Makassar yang bekerja paruh waktu untuk menghidupi diri. Mereka biasanya bekerja di pekerjaan non-formal seperti konstruksi. Banyak dari mereka masih dipekerjakan, tetapi beberapa dari mereka telah ditangkap dan dihukum oleh pihak imigrasi. Kemampuan mereka berbahasa Indonesia dengan lancar memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan.

3. *Employer Problem* (Masalah Pekerjaan)

Hanya sedikit orang yang menyadari bagaimana pengungsi asing dan pencari suaka menjalani kehidupan sehari-hari di dua tempat berbeda di Kota Makassar—rumah komunal dan lingkungan lokal. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk bertahan hidup. Mereka adalah orang-orang yang pindah sementara dari tempat tinggalnya (negara asal) ke Indonesia. Sebelum dikirim ke tujuan akhir mereka, mereka tetap di tempat penampungan sementara. Banyak dari mereka melakukannya secara sukarela atau dalam keadaan yang mencegah deportasi.

Pengungsi asing dan pencari suaka di Kota Makassar sepenuhnya mengandalkan bantuan perumahan dari IOM untuk mendukung kebutuhan hidup dasar mereka (sandang, pangan, dan papan). Melalui Agreement on Cooperation in Handling Irregular Migration, Internal

Refugees, Border Management, and Immigration tahun 2000, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan IOM. Kerangka hukum untuk operasi IOM di Indonesia disediakan oleh perjanjian ini. IOM selalu menandatangani MoU dengan instansi pemerintah lokal dan nasional terkait sebagai bagian dari setiap keterlibatan dengan instansi pemerintah. Minimnya pilihan pekerjaan bagi para pengungsi asing di Indonesia juga menyebabkan mereka menghadapi situasi yang perlahan membuat mereka tertekan. Pasalnya, mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk memulai prosedur penempatan di negara ketiga.

Pertimbangkan situasi dua imigran Afghanistan yang ditemukan bekerja sebagai buruh bangunan di Sengkang, Kabupaten Wajo, dengan penghasilan \$100,000 per hari. Mereka dipekerjakan oleh majikan. Dengan demikian, majikan memiliki peran penting mengapa pengungsi asing berani melanggar hukum, terutama larangan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan upah. Pengusaha atau mereka yang mempekerjakan pengungsi asing di ekonomi informal Makassar termasuk orang-orang yang bekerja di industri ini. Untuk menentang pembatasan yang digariskan dalam surat pernyataan pengungsi asing mereka, para pengungsi asing sering kali berani memecahkan kesulitan pemukiman kembali dan masalah biaya hidup.

Kewajiban yang Harus di Penuhi oleh Pengungsi asing

Ketentuan-ketentuan berikut harus dipatuhi oleh Pengungsi asing yang tinggal sementara di Indonesia:

1. Pengungsi asing harus tinggal di lokasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, kecuali telah diberikan izin tertulis untuk dipindahkan atau diberikan karena alasan tertentu;
2. Pengungsi asing tidak diperbolehkan berada di kawasan bandar udara atau pelabuhan laut, kecuali didampingi oleh petugas dari imigrasi;
3. Pengungsi asing tidak diperkenankan menerima tamu yang menginap atau menginap di penginapan yang disediakan;
4. Pengungsi asing wajib mematuhi semua hukum dan peraturan Indonesia, termasuk yang melarang mereka mencari pekerjaan, melakukan kegiatan mencari nafkah, mengoperasikan kendaraan tanpa SIM yang sah, dan menegakkan ketertiban umum;
5. Pengungsi asing wajib menghadap petugas imigrasi Indonesia setiap dua minggu sekali untuk mendaftar. Rumah Detensi Imigrasi Makassar melakukan pengawasan terhadap pengungsi asing baik di dalam maupun di luar tempat penampungan dengan:
 - a. memeriksa kembali identitas dan dokumen Pengungsi asing, mengambil foto dan sidik jari,

- b. meminta keterangan dari berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat bagi pengungsi asing terkait penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, dan
- c. menyediakan berkas pendataan.

Para pengungsi asing di Makassar melanggar undang-undang larangan bekerja karena tiga masalah utama. Pemukiman kembali, biaya perumahan, dan masalah ketenagakerjaan adalah sebutannya masing-masing. Pengungsi asing lebih bersedia untuk mengabaikan aturan untuk terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan mencari uang sebagai akibat dari masalah ini.¹⁸ Karena kedekatannya dengan Selat Makassar yang memisahkan pulau Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia, Kota Makassar memiliki lokasi yang strategis. Selat ini menghubungkan Laut Jawa Selatan dengan Laut Sulawesi Utara menurut deskripsi geografis.

Perlindungan Dasar kepada Pengungsi asing di Makasar

Ketentuan-ketentuan berikut harus dipatuhi oleh Pengungsi asing yang tinggal sementara. Kotamadya Kota Makassar berfungsi sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia dan salah satu dari empat kota teratas secara keseluruhan adalah Kota Makassar. Kota Makassar sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki arti penting sebagai pusat perdagangan dan jasa, hub industri, hub pemerintahan, hub jasa angkutan barang dan penumpang di darat, laut, dan udara, serta sebagai pusat pendidikan dan kesehatan. Kota Makassar terbagi menjadi 14 kecamatan dan 143 kelurahan secara administratif.

Sebagai tempat persinggahan para pengungsi asing dan pencari suaka di Indonesia, Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di negara Indonesia. Meningkatnya jumlah pengungsi asing dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Kota Makassar yang cenderung meningkat setiap tahun menjadi buktinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengungsi asing yang melewati Kota Makassar karena berbagai sebab. Pertama, sifat ramah lingkungan dan pemerintah daerah, yang dialami para pendatang beberapa tahun terakhir. Untuk memudahkan penempatan pengungsi asing di negara lain dengan bantuan organisasi internasional tersebut, kehadiran kantor perwakilan UNHCR dan IOM di Kota Makassar diperhitungkan. Ketiga, Kota Makassar memiliki pilihan tempat tinggal pengungsi asing yang memadai bagi para pengungsi asing.

Rudenim Makassar bertugas mengawasi para pengungsi asing di wilayah Kota Makassar. Kota Makassar adalah salah satu dari 13 kota di Indonesia yang memiliki fasilitas penahanan, dan narapidananya melakukan kewajiban dan tugas yang sama seperti yang ditahan di Kota Pekanbaru. Wilayah kerja Rudenim

¹⁸ Pemprov Sulsel, "Profil Kota Makassar," 2020, https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22.

Makassar tersebar di empat provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01 .PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Terkait fungsi pemulangan Rudenim, Rudenim Makassar tidak lagi menampung pengungsi asing karena sesuai Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Rudenim telah dikembalikan ke peran semula. Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut pembicaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Komite Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di Jenewa, Swiss, pada 5–6 September 2017 , serta pertemuan antara Dirjen Imigrasi dengan Delegasi IOM, dijelaskan berdasarkan isi surat edaran tersebut.

KESIMPULAN

Suatu hal mendasar bahwa Hak beriringan dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, IOM, dan UNHCR memaparkan serta meringkasnya kedalam berbagai point-point yang mudah dipahami oleh para pengungsi asing baik yang telah berada di Indonesia dari awal maupun warga asing yang berhati-hati dalam mengambil langkah untuk menjadi pengungsi asing di Indonesia. Berkaitan dengan hak permukiman, proses negosiasi dan diplomasi UNHCR yang berlarut-larut terkait pemukiman kembali atau penempatan pengungsi asing ke negara tuan rumah sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka karena mereka tidak lagi memiliki perlindungan nasional dari pemerintah negara asal mereka. Berkaitan dengan biaya hidup, IOM bertanggung jawab untuk membayar biaya hidup para pengungsi asing. Pengungsi asing dewasa menerima Rp 1.250.000 per orang per bulan, dan anak-anak menerima Rp 500.000 per orang per bulan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa kasus dimana pengungsi asing melakukan kerja sambilan yang jelas dilarang di NKRI ketika menjadi pengungsi asing. Kemudian membahas mengenai pekerjaan, pengungsi asing dan pencari suaka di Kota Makassar sepenuhnya mengandalkan bantuan perumahan dari IOM untuk mendukung kebutuhan hidup dasar mereka (sandang, pangan, dan papan). Melalui Agreement on Cooperation in Handling Irregular Migration, Internal Refugees, Border Management, and Immigration tahun 2000, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan IOM.

Daftar Pustaka

Abbas, W. “Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi asing,” *Journal of Political Sciences*, No. 2 (2018), 1-6.

- Bakry, U. S., *Hukum Humaniter Internasional, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Fitria, "Perlindungan Hukum bagi Pengungsi asing di Negara Ketiga: Praktik Indonesia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2015), 105-125.
- Haris, U., Lambali, S., Sukri, & Zulfikar, A. "Kebijakan Out-Reach dalam Penanganan Migran di Kota Makassar," *Jurnal PIR* (2019): 185-200
- Jastram, K. dan Achiron, M. Perlindungan Pengungsi asing, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi asing Internasional Bagi Anggota Parlemen Nomor 2-2001, Translated by Enny Soprapto and Rama Slamet, (Jakarta: Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi asing bekerjasama dengan Uni Antar-Parlemen, 2001), 46.
- Pemprov Sulsel, "Profil Kota Makassar," 2020, https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22.
- Purwanti, W. R., Zahidi, M. S., Aufiya, M. A. 2022, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 tahun 2016," *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, vol. 3, no. 2, pp. 119-129.
- Pusat Imigrasi Indonesia, Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi asing dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia, <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-asing-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/>, diakses 31 Oktober 2022.
- Rafsanjani, "Imigran di Kota Makassar," *Jurnal Universitas Negeri Makassar* (2019), 1-16.
- Roosevelt, F. What is a Primary Source? What is a DBQ (Document-based Question)? How Are Primary Sources Helpful in Learning? Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum.
- Saeful, P., "Penelitian Kualitatif, Equilibrium", Vol. 5 No.3, 2009, hal. 2.
- Sebastien, M., "UNHCR and the Migration Regime Complex in Asia- Pacific between Responsibility Shifting and Responsibility Sharing," *New Issues in Refugee Research*, Research Paper No. 283, (2016).
- Shalihah, F. & Nur, M. "Observations on the Protection of Refugees in Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia* (2021): 361-384.
- Sulaiman, A. S., Berita Resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulselprov.go.id/>, diakses 31 Oktober 2022.
- Tarigan, B. Y. A. & Syahrin, M. A. "Kondisi, Permasalahan, dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi asing Internasional di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional," *Journal of Law and Border Protection* (2021).
- UNHCR, Pengenalan tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR, (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2005), 53.
- Zahidi, M. S. 2014, "Pemikir-Pemikir Marxis Dalam Hubungan Internasional", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, vol. 10, no. 01, pp. 23-36.
- Zahidi, M. S. 2017, "Kepentingan Negara-Negara Anggota OKI Ditinjau Dari Derajat Legalisasi Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam", *Jurnal Opinio Juris*, vol. 21, pp. 82-103.